

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
TAHUN 2025**



**JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
TELEPON: 0274 385192**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
Alamat	Jalan Gedong Kuning No. 150A Banguntapan Bantul DIY
Nomor Telepon	(0274) 385192

Penjelasan Umum:

PT. BPR Chandra Muktiartha melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang perbankan dan wajib menerapkan Tata Kelola yang baik. Penerapan Tata Kelola yang baik wajib dilaksanakan demi menjaga kelangsungan usaha BPR jangka panjang serta memaksimalkan nilai perusahaan. Kebijakan Tata Kelola BPR yang mengacu pada ketentuan POJK No 9/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dimana setiap BPR membuat Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menerapkan Tata Kelola yang baik, BPR menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kewajaran. Manajemen BPR berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada POJK No 9/POJK.03/2024 dan SEOJK No 12/SEOJK.03/2024 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola selama tahun 2025:

- A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi.
- B. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
- C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
- E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
- F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
- G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.
- H. Rasio Gaji Tertinggi & Gaji Terendah.
- I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun.
- J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
- K. Jumlah Penyimpangan Internal (internal fraud).
- L. Permasalahan Hukum yang dihadapi
- M. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- N. Pemberian Dana untuk Kegiatan sosial dan Kegiatan Lain

Penerapan Tata Kelola yang cukup baik di PT. BPR Chandra Muktiartha pada tahun 2025, menunjukkan keberlanjutan BPR yang cukup positif meskipun kinerja BPR belum optimal dan belum sepenuhnya tercapai target-target di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum sepenuhnya pulih.



Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Secara umum manajemen BPR telah menerapkan tata kelola yang cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Cicilia Wiwik
	Jabatan	Direktur

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Bertanggungjawab penuh pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai kewenangan, tugas & tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar BPR, keputusan RUPS & Peraturan UU yang berlaku
3. Menjalankan peran & tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen & sesuai prinsip kehati-hatian
4. Memiliki wewenang mewakili BPR sesuai ketentuan peraturan UU, anggaran dasar dan keputusan RUPS
5. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan organisasi BPR antara lain Manajemen Risiko, Kepatuhan terintegrasi & terkoordinasi & meningkatkan kemampuan antar satuan kerja
6. Menyusun & menetapkan kebijakan remunerasi serta mengevaluasi secara berkala kebijakan remunerasi bagi PE & Pegawai
7. Menindaklanjuti temuan audit & rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan AI BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan & Otoritas lainnya
8. Menunjuk PE yang melaksanakan Fungsi AI, Manajemen Risiko, Kepatuhan, APU PPT, SAF, Integritas Pelaporan Keuangan Bank
9. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai
10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS
11. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
12. Menyediakan data & informasi yang akurat, relevan & tepat waktu kepada Dewan Komisaris
13. Menyusun Rencana Bisnis BPR yang mencakup rencana strategis dengan persetujuan Dewan Komisaris & menyampaikan Rencana Bisnis BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis BPR
14. Memastikan BPR telah memiliki & menerapkan semua Kebijakan & Prosedur dalam menunjang kegiatan operasional BPR



15. Bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian BPR yang disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian dalam menjalankan tugasnya
16. Bertanggungjawab atas ketaatan pelaksanaan Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi yang dievaluasi secara berkala

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Penerapan Tata Kelola yang baik telah diupayakan serta penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
2. Direksi telah membuat ketentuan internal BPR perihal cleansing debitur DPK dan NPL dari Bagian Pemasaran Kredit ke Bagian Pencegahan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (tim Remedial).
3. Direksi telah membuat ketentuan internal BPR perihal penyesuaian suku bunga kredit di bawah BLR sesuai risiko kredit.
4. Direksi telah melakukan review terhadap ketentuan-ketentuan internal BPR, dan telah dilakukan pembaruan ketentuan-ketentuan internal BPR terkait dengan kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga dan operasional BPR secara proper dan sesuai dengan SOP (mereview SOP/SK DIR/ Memo yang terkait termasuk SOP Operasional itu sendiri).
5. Upaya penguatan fungsi Kepatuhan dan Audit Internal masih terus dilakukan.
6. Direksi telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk PE Remedial/ Collection untuk menangani akun T3 dan NPL.
7. Direksi telah membentuk PIC AYDA dan Lelang yang bertugas penuh mengelola AYDA secara fokus guna accountability jelas dan percepatan keputusan.
8. Direksi mengupayakan pengelolaan SDM sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu evaluasi dan kajian terhadap SDM di unit kerja masing-masing secara berkesinambungan dan penyempurnaan struktur organisasi atas dasar jalinan jabatan yang lebih realistis dengan orientasi hasil dan tingkat efisiensi biaya.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	FX Soewardi WP
	Jabatan	Komisaris Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
- b. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/ atau keputusan RUPS.
- c. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana pada huruf c, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
- f. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;



2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - g. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap :
 - Pelaksanaa fungsi kepatuhan pada BPR
 - Penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - h. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas lainnya.
 - i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/ atau
 - Keadaan atau perkiraan kadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

2.	Nama	CH Bagus Anggara Jita
	Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
- b. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/ atau keputusan RUPS.
- c. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana pada huruf c, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
- f. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - g. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap :
 - Pelaksanaa fungsi kepatuhan pada BPR
 - Penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - h. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas lainnya.
 - i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/ atau
 - Keadaan atau perkiraan kadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi:



1. Melaksanakan penerapan Tata Kelola yang baik dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
2. Direksi agar menetapkan Account T3 (>61-90 hari) digabung ke tim NPL/ Remedial disetiap jaringan kantor.
3. Direksi agar memberlakukan penyesuaian suku bunga kredit di bawah BLR sesuai risiko kredit.
4. Direksi agar melakukan review terhadap semua perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang proper dan sesuai dengan SOP (mereview SOP/SK DIR/ Memo yang terkait serta perbaikan SOP Operasional).
5. Penguatan fungsi Kepatuhan dan Audit Internal.
6. Direksi agar melakukan perubahan struktur organisasi untuk PE Remedial/ Collection untuk menangani akun T3 dan NPL.
7. Direksi agar membentuk PIC AYDA dan Lelang yang bertugas penuh mengelola AYDA secara fokus guna accountability jelas dan percepatan keputusan.
8. Evaluasi dan kajian terhadap SDM di unit kerja masing-masing secara berkesinambungan dan penyempurnaan struktur organisasi atas dasar jalinan jabatan yang lebih realistis dengan orientasi hasil dan tingkat efisiensi biaya.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

PT. BPR Chandra Muktiartha dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) belum wajib membentuk komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

PT. BPR Chandra Muktiartha dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) belum wajib membentuk komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Cicilia Wiwik
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	FX Soewardi WP
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	CH Bagus Anggara Jita
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Agus Pramono
	Nama Kelompok Usaha BPR	BPR Saudara
	Persentase Kepemilikan (%)	45,67
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	45,67
2.	Nama	Halim Susanto
	Nama Kelompok Usaha BPR	BPR Saudara
	Persentase Kepemilikan (%)	34,33
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	34,33
3.	Nama	PT. Merdeka Jaya Sentosa
	Nama Kelompok Usaha BPR	BPR Saudara
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,00

Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR. Seluruh pemegang saham memiliki saham pada kelompok usaha BPR yaitu BPR Saudara.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Cicilia Wiwik
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	FX Soewardi WP
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	CH Bagus Anggara Jita
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Cicilia Wiwik
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	FX Soewardi WP
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	CH Bagus Anggara Jita
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada



Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Agus Pramono
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ada
2.	Nama	Halim Susanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ada
3.	Nama	PT. Merdeka Jaya Sentosa
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ada

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham pada BPR
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain maupun Pemegang Saham pada BPR
Pemegang saham Agus Pramono dan Pemegang saham Halim Susanto memiliki hubungan keuangan dengan PT. Merdeka Jaya Sentosa, keduanya sebagai pemegang saham pada PT Merdeka Jaya Sentosa



10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Cicilia Wiwik
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	FX Soewardi WP
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	CH Bagus Anggara Jita
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Agus Pramono
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Agus Pramono memiliki hubungan keluarga dengan Halim Susanto



2.	Nama	Halim Susanto
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Halim Susanto memiliki hubungan keluarga dengan Agus Pramono
3.	Nama	PT. Merdeka Jaya Sentosa
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Agus Pramono dan Halim Susanto pemegang saham di PT. Merdeka Jaya Sentosa saling memiliki hubungan keluarga satu sama lain.

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham pada BPR

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain maupun Pemegang Saham pada BPR

Pemegang saham Agus Pramono dengan Halim Susanto memiliki hubungan keluarga dan keduanya pemegang saham di PT. Merdeka Jaya Sentosa

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp300.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp444.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp30.000.000



Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp2.850.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0



2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
--	----------------



Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Kebijakan remunerasi berupa gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS
Jumlah gaji, tunjangan dan transportasi Direksi sampai dengan 31 Desember 2025 diterima oleh 1 orang Direksi.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	5,66 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,00 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,06 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,32 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,67 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	06 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
1. Pengawasan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko		



2. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan akhir Juli 2025
3. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur
4. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk Direksi

2.	Tanggal Rapat	04 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pengawasan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko
2. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan akhir Agustus 2025
3. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur
4. Pemantauan laporan keuangan
5. Pengendalian risiko operasional
6. Review pelaksanaan sosialisasi Literasi dan Inklusi keuangan Bank kepada masyarakat
7. Review pelayanan pengaduan nasabah
8. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk Direksi

3.	Tanggal Rapat	08 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pengawasan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko
2. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan akhir September 2025
3. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur
4. Penerapan APU PPT
5. Standard penyelenggaraan teknologi informasi BPR
6. Akses pembiayaan UMKM
7. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk Direksi

4.	Tanggal Rapat	06 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pengawasan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko
2. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan akhir Oktober 2025
3. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur
4. Pemantauan laporan keuangan
5. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk Direksi

5.	Tanggal Rapat	05 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pengawasan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko
2. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan akhir November 2025
3. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur



4. Strategi upaya pencegahan dan penyelesaian NPL
5. Pemantauan laporan keuangan
6. Rencana Bisnis BPR
7. Akses pembiayaan UMKM
8. Rencana penggabungan BPR
9. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk Direksi

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 5 (lima) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2025.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	FX Soewardi WP
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	CH Bagus Anggara Jita
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Pada tahun 2025 terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris, diantaranya Imron Fauzie dan Subagyo Nugroho digantikan oleh FX Soewardi WP dan CH Bagus Anggara Jita pada bulan Juli berdasarkan RUPS.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus



Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus



Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan internal/internal fraud (nihil).

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus



1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	2 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Permasalahan hukum yang dihadapi selama tahun 2025 sebanyak 2 kasus untuk Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian. 2 kasus tersebut terdiri dari 1 kasus nasabah Kantor Cabang Wonosari dan 1 kasus nasabah Kantor Cabang Yogyakarta.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2025.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	24 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Takbir Keliling Ngampilan
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	19 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Idul Adha Ngampilan
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	14 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Event Kesenian Ngampilan
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	12 Agustus 2025



	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan HUT RI Ngampilan
	Jumlah (Rp)	Rp400.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	20 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Kegiatan Lomba Mancing Ngampilan
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	29 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Kegiatan Acara Kitab Bakpia Ngampilan
	Jumlah (Rp)	Rp150.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	23 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Untuk Paroko Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kemetiran
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	12 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Donasi Peduli Bencana Alam Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	20 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Kegiatan Takbir Keliling Forum



		Remaja Islam Baleharjo
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	23 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Penyelenggaraan Rasul Kelurahan Baleharjo 2025
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	30 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan bersih desa dan HUT Kelurahan Gedangrejo Karangmojo
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	13 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Sponsorship Turnamen Voli Kelurahan Sidorejo Cup III 2025
	Jumlah (Rp)	Rp250.000

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bantul, 23 April 2026

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA



Cicilia Wiwik
Direktur

FX Soewardi WP
Komisaris Utama